



**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP BUPATI/WALIKOTA
DALAM RANGKA PENGAWASAN OLEH GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh :

AGUNG EKA MULYA DHARMA

2120113035

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ANDALAS PADANG**

2025

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PENGAWASAN OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

Agung Eka Mulya Dharma, Nim 2120113035, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2024, 140

Halaman

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa salah satu tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota, dalam melaksanakan tugas tersebut Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota. Ada 16 pelanggaran administratif yang dapat dijatuhkan sanksi oleh Gubernur apabila Bupati/Walikota melakukan pelanggaran administratif. Namun demikian adanya fenomena dimana Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada Bupati/Walikota, walaupun Bupati/Walikota melakukan hal-hal yang tidak semestinya, atau tidak pantas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara hirarki. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu : 1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota 2. Bagaimana pengaturan sanksi administratif terhadap Bupati/Walikota dalam rangka pengawasan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berupa pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Ditemukan adanya pembatasan dan penyempitan ruang lingkup pemberian sanksi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota pada rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 apabila dibandingkan dengan rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan adanya pembatasan dan penyempitan ruang lingkup pemberian sanksi akan membuat penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota tidak optimal, dan memperlemah kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 2. Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota merupakan turunan dari teori negara kesatuan, pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga kesatuan dari negara kesatuan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota merupakan salah satu instrumen penegakan hukum administrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan telah dilengkapi dengan instrumen sanksi administratif.

Kata Kunci: Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Bupati/Walikota, Pengawasan, Sanksi Administratif.

**ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST REGENTS/MAYORS IN THE
FRAMEWORK OF SUPERVISION BY THE GOVERNOR AS
REPRESENTATIVE OF THE CENTRAL GOVERNMENT IN THE
REGIONAL**

**Agung Eka Mulya Dharma, Nim 2120113035, Mater of Law Study Program
Postgraduate Faculty of Law, Universitas Andalas, 2024, 140 Pages**

ABSTRACT

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has regulated that one of the duties of the Governor as Representative of the Central Government is to supervise the Regent/Mayor. In carrying out this task the Governor as Representative of the Central Government has the authority to impose sanctions on the Regent/Mayor. There are 16 administrative violations that can be imposed sanctions by the Governor if the Regent/Mayor commits an administrative violation. However, there is a phenomenon where the Governor as the Representative of the Central Government cannot impose sanctions on the Regent/Mayor, even though the Regent/Mayor does things that are inappropriate or inappropriate in the administration of hierarchical regional government. This then becomes the background to the questions in this thesis research, which are: 1. How is the supervision carried out by the Governor as Representative of the Central Government towards the Regent/Mayor? 2. How are administrative sanctions regulated against the Regent/Mayor in the context of supervision by the Governor as Representative of the Central Government? The type of research used in this research is normative juridical, namely an approach to problems through legal research by discussing doctrines and principles in legal science. The research results can be summarized as follows: 1. It was found that there were restrictions and narrowing of the scope of giving sanctions by the Governor as Representative of the Central Government to the Regent/Mayor in the regime of Law Number 23 of 2014 when compared with the regime of Law Number 32 of 2004, with the limitation and narrowing of the scope of giving sanctions would makes administrative law enforcement carried out by the Governor as Representative of the Central Government to the Regent/Mayor suboptimal, and weakens the position of the Governor as Representative of the Central Government. 2. Supervision carried out by the Governor as Representative of the Central Government to the Regent/Mayor is a derivative of the theory of the unitary state, supervision is very important to maintain the unity of the unitary state. Supervision carried out by the Governor over the Regent/Mayor is one of the administrative law enforcement instruments that has been regulated in the Regional Government Law and has been equipped with administrative sanctions instruments.

Keywords: Governor as Central Government Representative, Regent/Mayor, Supervision, Administrative Sanctions